



Treasury Policy Brief

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Edisi Nomor 10, Mei 2018

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara mulai dilaksanakan secara digital, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Berbagai inovasi yang dilakukan secara digital dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat, baik kepada pemerintah itu sendiri, maupun kepada masyarakat dalam menunaikan kewajibannya dengan pemerintah. Dengan tetap memerhatikan tantangan yang ada, pengelolaan keuangan negara melalui digitalisasi pengelolaan akan semakin efektif dan efisien.

Menurut Gupta, dkk (2018) dalam *Public Finance Goes Digital*, keuangan negara adalah sebuah seni dalam mengumpulkan dan membelanjakan dana untuk memberikan pelayanan dan manfaat, mendistribusikan pendapatan, dan melancarkan dinamika dari sebuah proses bisnis. Efektivitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara vital bergantung pada kemampuan dalam mengumpulkan, memproses, dan merespon berbagai macam informasi.

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah memulai sebuah babak baru: Penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, baik dalam aspek penerimaan negara dan belanja negara. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk digital mempengaruhi beberapa aspek dan memberikan perubahan yang signifikan, baik dari sisi pemerintah sebagai pengelola keuangan negara, maupun pada *stakeholder* yang menjadi pengguna layanan keuangan negara.

Digitalisasi saat ini mulai membentuk kembali inti dari informasi tentang bagaimana cara kebijakan pajak dan belanja negara dirancang dan dilaksanakan. Digitalisasi menawarkan sarana untuk mengembangkan efektivitas dari kebijakan saat ini. Selain itu, Digitalisasi juga membuka peluang untuk perumusan kebijakan baru.

Digitalisasi menurut Gartner dalam Gray dan Rumpel (2015) diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan menyediakan kesempatan baru memproduksi pendapatan dan nilai; Digitalisasi merupakan sebuah proses pergerakan menuju bisnis digital. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan sebuah cara baru dalam mengelola dan menjalankan suatu proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi.

Menilik dari sisi *treasury*, kita melihat bahwa pengelolaan keuangan negara telah banyak mengadopsi penggunaan teknologi. Pekerjaan yang sebelumnya masih menggunakan dokumen fisik perlahan berubah menjadi berbentuk digital. Penggunaan perangkat digital juga semakin

berkembang, merambah pada berbagai aspek pekerjaan.

Pengelolaan keuangan negara dalam ranah perbendaharaan semakin familiar dengan penggunaan teknologi. Dalam bidang penerimaan negara, pembayaran penerimaan negara dikembangkan melalui sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Pembayaran pajak, bea dan cukai, serta PNPB dikembangkan menjadi sistem elektronik. Apabila sebelumnya kita hanya dapat membayar setoran penerimaan negara dengan menyetorkan surat setoran melalui *teller* pada bank, saat ini pembayaran dapat diakses melalui berbagai sarana, mulai dari mesin ATM hingga *internet banking* yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon seluler.

Di bidang belanja negara, pengelolaan secara digital juga secara komprehensif diterapkan. Penatausahaan tagihan belanja satuan kerja (satker) pada KPPN dikelola melalui Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran semakin efektif dan efisien dengan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Selain itu, saat ini mulai diimplementasikan Aplikasi SPM Elektronik (e-SPM). Dengan Aplikasi e-SPM, dokumen yang disampaikan satuan kerja kepada KPPN berupa dokumen elektronik, yang disampaikan lewat jaringan internet dan tanpa melalui tatap muka. Untuk menjamin keabsahan dokumen dan validitas data, digunakan teknologi *Digital Signature* (tanda tangan digital) pada setiap dokumen yang dikirimkan melalui aplikasi. Hal ini tentu saja merubah proses bisnis pelaksanaan belanja negara secara signifikan.

Digitalisasi di Berbagai Negara

Perkembangan pengelolaan keuangan negara secara digital tidak hanya terjadi di Indonesia, namun secara luas juga diterapkan di negara-negara lain. Digitalisasi pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah hal yang membawa manfaat, dimana pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal dengan lebih efektif.

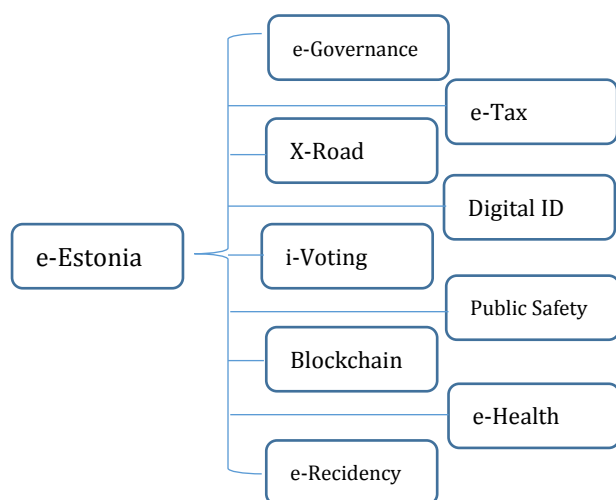
Di India, negara dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 1.354.051.854 jiwa, terbanyak kedua di dunia (sumber: worldpopulationreview.com), telah mengembangkan proses digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. India mengembangkan teknologi biometrik yang digunakan dalam menyalurkan bantuan sosial. Teknologi biometrik memonitor dan mencatat karakteristik biometrik, seperti sidik jari dan retina, untuk mengenali identitas seseorang dengan lebih akurat. Penyaluran subsidi dan pembayaran dilakukan kepada rekening penerima yang disambungkan dengan menggunakan identitas biometrik, sehingga penyalurannya menjadi lebih efektif.

Di Inggris, sistem komputer pada HM *Revenue and Customs* mengacu pada berbagai sumber dari pemerintah dan perusahaan, juga dari jejak digital individual, untuk membangun profil dari total pendapatan wajib pajak, kemudian data tersebut digunakan untuk menilai keakuratan informasi yang mereka laporkan. Kapabilitas pemrosesan data tersebut juga dapat dinilai untuk melakukan estimasi penerimaan negara yang akan diterima.

Salah satu negara yang mendapat perhatian internasional atas proses digitalisasi pemerintah adalah Estonia. High (2018) menilai bahwa Estonia merupakan negara yang paling digital di seluruh dunia. Di Estonia, urusan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah difasilitasi secara digital dengan layanan yang disebut *e-Estonia*.

Digitalisasi pengelolaan pemerintah Estonia dimulai sekitar dua dekade yang lalu. Digitalisasi di Estonia merambah pada berbagai bidang, mulai dari pengelolaan keuangan negara hingga bidang kesehatan dan kependudukan. Lufkin (2017) menyatakan saat ini, Estonia merupakan salah satu acuan bagi negara lain dalam pengelolaan pemerintahan secara digital, termasuk dalam bidang keuangan negara.

Digitalisasi di Berbagai Bidang di Estonia



Sumber: e-estonia.com, (2018, diolah)

Manfaat Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Gupta, dkk (2018), digitalisasi pengelolaan keuangan negara memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Pemerintah dapat mengumpulkan, memproses, menyebarkan, informasi aktifitas keuangan yang lebih tepat waktu, mudah diakses, dan transparan.
- Pemerintah memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara, dan
- Pemerintah dapat mengembangkan berbagai kebijakan baru dengan adanya akses yang lebih besar mengenai informasi, dan sistem yang dilaksanakan secara digital.

Digitalisasi pengelolaan keuangan negara juga bermanfaat untuk pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Masyarakat memiliki kemudahan dalam menyelesaikan urusan administrasi dengan pemerintah. Bagi pemerintah, pengelolaan keuangan dapat memberikan keuntungan dalam hal efisiensi biaya, efektivitas pekerjaan pemerintahan, serta manfaat dalam hal tersedianya informasi yang lebih cepat bagi pemerintah. Hal ini tentu saja merupakan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

McKinsey & Company mengestimasi digitalisasi proses pembayaran pemerintah (baik penerimaan dan pengeluaran) dapat menghemat setidaknya satu persen dari GDP pada negara berkembang. Dengan diterapkannya digitalisasi, pemerintah dapat mengefisienkan biaya-biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan dengan proses yang manual.

Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara secara Digital

Pengelolaan keuangan secara digital tentu saja memiliki tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan pemerintah. Reformasi digitalisasi memerlukan desain dan perlindungan dengan aman. Selain itu, diperlukan juga pemahaman yang jelas mengenai tantangan dan keterbatasannya.

Menurut Gupta, dkk (2018), beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses digitalisasi keuangan negara antara lain:

- Pemahaman pemerintah dalam mengadopsi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas penguasaan teknologi.
- Dalam menerapkan pengelolaan keuangan secara digital, pemerintah harus memastikan inklusi digital, yaitu masyarakat dan perusahaan dapat mengakses dunia digital dan memanfaatkan teknologi.
- Reformasi kelembagaan yang saling melengkapi. Salah satu tantangan pemerintah dalam

mengupayakan manfaat digitalisasi adalah upaya pemerintah dalam mengubah tradisi dan kemampuan tradisional dan mengelola keuangan negara secara berbeda.

Tantangan-tantangan yang ada dalam pengelolaan keuangan negara harus dapat diperhatikan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil manfaat optimal dari digitalisasi.

Rekomendasi

Secara umum, pengelolaan keuangan negara secara digital memberikan potensi manfaat yang sangat besar. Dengan adanya digitalisasi, baik pemerintah maupun masyarakat dapat memetik berbagai kemudahan yang sebelumnya tidak disediakan oleh sistem yang tradisional.

Pengelolaan keuangan negara secara digital merupakan gerakan yang masif, yang dilakukan oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dipandang sebagai sesuatu yang penting dilakukan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang ada.

Pemerintah perlu memahami karakter yang ada di dalam negeri, dan memahami kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi. Perlu dilakukan kajian dan *review* yang lebih mendalam sebelum pemerintah menerapkan kebijakan baru yang berbau digital, sehingga risiko kegagalan implementasi dapat dihindari.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Soft Launching Aplikasi e-SPM pada KPPN Jakarta II*. Diakses di <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/berita/berita-terbaru/202-berita->

- kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2796-soft-launching-aplikasi-e-spm-pada-kppn-jakarta-ii.html tanggal 13 Juli 2018
- E-Estonia. Diakses di e-estonia.com tanggal 12 Juli 2018
- Gray, Jeff dan Rumpe, Bernhard. (2015). *Models for Digitalization. Software & Systems Modelling Journal. October 2015, Volume 14, Issue 4, pp 1319-1320*. Jerman: Springer Berlin Heidelberg.
- Gupta, Sanjeev, dkk. (2018). *Public Finance Goes Digital. F&D Magazine March 2018*. Diakses di www.imf.org/fandd tanggal 12 Juli 2018
- Gupta, Sanjeev, dkk. (2017). *Digital Revolution in Public Finance*. Washington DC: *International Monetary Fund*
- High, Peter. (2018). *Lessons From The Most Digitally Advanced Country In The World*. Diakses di <https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2018/01/15/lessons-from-the-most-digitally-advanced-country-in-the-world/#6f911ce621ac> tanggal 13 Juli 2018
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. MPN G2. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/mpn-g2/> tanggal 9 Juli 2018.
- Lufkin, Brian. (2017). *Could Estonia be the first 'digital' country?*. Diakses di <http://www.bbc.com/future/story/20171019-could-estonia-be-the-first-digital-country> tanggal 13 Juli 2018
- Total Population by Country 2018*. (2018). Diakses di worldpopulationreview.com/countries/ tanggal 12 Juli 2018

TIM TREASURY POLICY BRIEF

Pengarah

RM Wiwieng Handayaniingsih

Pemimpin Redaksi

Windraty Ariane Siallagan

Redaksi

Agung Hartoyo

Agus Triyono

Andreas Senna Ndaramta

Ernest Hasiolan Sebastian

Laurentius Ade Wida Kurniawan

Yafi Tanzil Huda

Yantsenley Yudhistira

Sekretariat

Heru Prabowo

Direktur Sistem Perbendaharaan

Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

DISCLAIMER/ LEGAL NOTICE

Treasury Policy Brief adalah rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Subdit. Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan berdasarkan hasil kajian/publikasi Litbang Perbendaharaan. Opini dan pendapat yang dimuat tidak merefleksikan pandangan resmi instansi. Sekretariat: Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 4 Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat (10710), email:tpb.litbangdsp@kemenkeu.go.id